

# KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN\*)

Hafid Abbas\*)

*Kemerdekaan bangsa Indonesia amat mahal karena dibeli dengan pengorbanan jiwa dan raga yang begitu besar dari putra-putra terbaik bangsa. Barangkali tidak satu pun negara di dunia yang mempunyai taman makam pahlawan sebanyak yang kita miliki. Semua ini adalah saksi bahwa bendera merah putih yang kita kibarkan saat ini memberi makna bahwa merah melambangkan merahnya darah para syuhada yang telah membasahi ibu pertiwi, dan warna putih melambangkan betapa air mata para orangtua yang mendambakan putranya atau isteri yang mendambakan suaminya untuk kembali dari medan perjuangan namun telah gugur dan pergi untuk selamanya. Kini merah putih sudah berkibar di udara yang seakan berbisik pada kita semua apa kiranya yang patut kita lakukan untuk menghargai pengorbanan para syuhada itu.*

Berabad-abad lamanya kita dijajah, terbelenggu dalam alam keterbelakangan. Bangsa kita disiksa, diasingkan, dipenjarakan dan diperlakukan dengan berbagai bentuk yang amat merendahkan martabat kita sebagai bangsa. Itulah sebabnya mengapa pada pembukaan UUD 1945 dengan tegas kita menyatakan tujuan kemerdekaan kita yang hendak menghilangkan segala bentuk penjajahan di muka bumi karena tidak sesuai dengan peri-

kemanusiaan dan dan perikeadilan. Kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum agar kita sejajar dengan bangsa mana pun di muka bumi ini.

Makna kedua dari lokakarya ini adalah keberadaan kota Makassar tempat lokakarya ini diselenggarakan sebagai kota bermonumen "Korban 40 Ribu Jiwa" dari pembantaian Pasukan Westerling, yang terjadi antara 11 Desember - 3 Maret 1947, kurang

---

\*) Cuplikan dari makalah yang disampaikan pada Lokakarya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam.

\*\*\*) Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

dari dua tahun setelah kita merdeka. Ini adalah bukti bahwa penjajah sesungguhnya tidak ikhlas melihat kita merdeka dan berdaulat. Mereka ingin merebut kembali kemerdekaan yang telah kita peroleh itu. Pengorbanan 40 ribu jiwa kiranya dapat menjadi renungan tersendiri bagi kita semua dan peserta loakarya ini yang akan membahas, apa, mengapa dan bagaimana Konvensi Menentang Penyiksaan itu (*Convention Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment*).

Memang, dalam abad pasca-kolonialisme selepas perang dunia kedua, bentuk-bentuk penjajahan politik sudah semakin berkurang di dunia, walaupun masih terjadi dalam skala kecil di beberapa belahan dunia. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa kolonialisme dalam bidang-bidang lain -- seperti dalam bidang ekonomi, budaya, dan Iptek -- juga surut di dalam percaturan dunia. IMF sebagai contoh adalah bentuk kolonialisme baru di bidang ekonomi yang menggantikan kolonialisme politik yang sudah semakin kecil skalanya sejak tahun 1960-an. Ketika IMF mengancam akan menunda pencairan bantuannya kepada kita, seketika itu pula terjadi gejolak moneter dan bahkan ketegangan politik dan sosial di kalangan kita. Kemandirian kita

sebagai negara yang berdaulat tampak kehilangan makna. Kemerdekaan yang telah kita proklamirkan sejak 1945 akan kehilangan makna apabila kita tetap terbelenggu dalam alam cengkeraman *hegemony* kekuatan politik, ekonomi dan sosial budaya negara maju atau badan-badan internasional lainnya.

Sisi lain dari realitas semakin menguatnya bentuk-bentuk imperialisme baru itu, saat ini tabungan sosial yang kita miliki sejak kemerdekaan berupa: semangat kesetiakawanan, persaudaraan, idealisme, patriotisme, nasionalisme dan sebangsanya tampak semakin kritis dan amat mendesak untuk diselamatkan. Kesungguhan pemerintah menyelamatkan semua aset tabungan perbankan nasional tampaknya perlu pula dilakukan dengan cara serupa agar tabungan sosial kita tidak dirampas atau tergantikan dengan isme-isme baru berupa materialisme, individualisme, sukuisme, sadisme dan sebagainya. Mudah-mudahan lokakarya tentang anti penyiksaan yang kita selenggarakan selama beberapa hari di kota besejarah ini dapat merumuskan secara bagaimana tabungan sosial yang kita miliki yang mungkin masih juga diperlukan untuk menghadapi dinamika arus globalisasi, demokratisasi, regionalisme, polarisasi, marginalisasi

dan fragmentasi yang cenderung semakin rumit dan mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan kita.

Akibat kecenderungan semakin pudarnya idealisme, patriotisme dan nasionalisme di dada kita, sejak beberapa tahun terakhir ini kita sebagai bangsa terkesan tengah mengalami disorientasi masa depan. Kita tampaknya gagal meletakkan ikhtiar kolektif yang hendak dicapai menuju suatu tatanan hari depan yang kita dambakan bersama. Lain halnya dengan negara-negara tetangga, Malaysia misalnya melalui dengan wawasan keunggulan bertekad untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Meskipun pencanangan visi itu baru dimulai Mahatir Muhammad pada tanggal 28 Pebruari 1991, Malaysia ternyata telah mencapai prestasi pembangunan yang relatif lebih maju dibanding Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Demikian pula Filipina dalam era kepresidenan Fidel Ramos, negara itu kembali memperjelas orientasinya yang kuat ke masa depan (*Win the Future*). Meskipun Ramos mewarisi keadaan negara yang amat terpuruk dari peninggalan Ferdi-

nan Marcos dan Cory Aquino, ternyata bangsa ini dapat bangkit kembali dari puing-puing yang ada. Visi bersama itu telah berhasil dirumuskan dan dicanangkan dalam suatu gerakan *New Vision of Society*, dan langkah itu telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Nyatanya, meskipun kedua negara tetangga ini dilanda krisis serupa seperti yang dialami Indonesia, namun mereka mempunyai kondisi yang jauh lebih stabil dibanding keadaan kita.

Mungkin karena ketiadaan orientasi orientasi masa depan, kita sejak beberapa tahun terakhir ini telah tercatat sebagai negara dengan tingkat kekerasan tertinggi. Adegan Indonesia menangis di layar kaca telah menjadi tontonan ke seluruh dunia. Media cetak dan elektronik telah amat berjasa memperkenalkan hal ini kepada masyarakat internasional. Terkadang hanya peristiwa sederhana ternyata dapat meluas menjadi peristiwa besar.<sup>1</sup>

Sejak peristiwa 12 Mei 1998 yang bermula tertembaknya empat mahasiswa pahlawan Reformasi di Universitas Trisakti, dalam beberapa hari saja tercatat tidak kurang 500 orang mening-

---

1. Kasus Bankalan misalnya, pada tanggal 1 Nopember 1998, seorang pencuri motor bernama Musa ditangkap polisi ternyata berakibat timbulnya berbagai kekerasan yang mengakibatkan tiga orang polisi tewas dianiaya massa yang beringas (Sumber: Suara Pembaruan, 2 November 1998).

gal akibat berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan di ibukota. Pada tanggal 14-15 Mei menjelang keberangkatan Presiden Soeharto ke Kairo untuk mengikuti KTT G-15 negara berkembang, terdapat 28 orang meninggal pada saat kerusuhan di Surakarta. Sejak itu tampaknya hampir setiap hari tanah air kita yang dikenal sebagai Samudra Untaian Manikam Khatulistiwa senantiasa dihiasi dengan kerusuhan-kerusuhan sosial, penganiayaan dan berbagai tindakan kejam lainnya. Di Aceh saat ini masih terus berduka, tiap hari terdapat beberapa orang meninggal baik yang dikenal maupun tidak, baik dari kalangan militer maupun dari Gerakan Separatisme Aceh Merdeka, dan bahkan sudah tidak terhitung berapa banyak rakyat yang tidak berdosa telah menjadi korban. Demikian pula di Maluku, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Irian Jaya, Sulawesi Tengah, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini tindakan penganiayaan, kekerasan dan kekejaman tampak semakin menodai keindahan flora dan fauna di atas bentangan ekuator yang menjangkau lebih 17.800 buah pulau. Bahkan yang lebih mengerikan lagi teror, bom, asap hitam telah menggejala di mana-mana.

Ternyata perjalanan panjang menuju tatanan masyarakat

yang aman dari segala rasa takut, bebas dari penganiayaan dan berbagai bentuk kekejaman lainnya yang merendahkan martabat manusia, masih harus kita lalui. Kita agaknya belum dapat menarik hikmah sejarah penderitaan dan segala bentuk kekejaman yang kita alami selama ratusan tahun dalam alam cengkeraman penjajahan. Kita belum bisa hidup damai dalam bingkai pluralisme dan perbedaan sesuai motto kita "Bhinneka Tunggal Ika". Kita masih terus terbelenggu oleh romantisme identitas-identitas sempit yang diwadahi dalam bentuk kesukuan, organisasi sosial dan politik, ataupun kelompok-kelompok tertentu yang tidak mengedepankan kepentingan kebersamaan sebagai bangsa besar. Kita belum banyak belajar untuk keluar dari tembok-tembok kepicikan melihat sesuatu kebenaran dari berbagai sudut pandang. Dalam kesempatan ini agaknya penting kita mengenang pandangan Mahatma Gandhi tentang kebenaran. *We must remember that truth has many sides and it is ever changing. What appear to be true today may not be true tomorrow. Or what appears to be truth to us does not necessarily appear to be the truth to others. We cannot therefore say that we possess the truth and that our understanding or truth is the right one. We must develop the abil-*

*ity to look at everything from different perspectives and have the humility to understand that we could be wrong.*

Dalam kaitannya dengan kebenaran dan antikekerasan Gandhi lebih lanjut membagi kekejaman itu dalam dua turunan yakni pasif dan fisik. Kekejaman fisik berupa penyiksaan, pembunuhan, peperangan, pembakaran, dan sebagainya. Kekejaman pasif dapat berupa fitnah, ucapan tidak senonoh, sinisme, dan sebagainya. Hubungan antara keduanya kata Gandhi adalah ibarat api dan bensin. Sekiranya tidak diinginkan terjadinya kekejaman fisik maka jauhkanlah bensin itu dari api. Artinya hindarilah segala bentuk perbuatan kekejaman pasif.<sup>2</sup>

Demikianlah sekilas pandangan Gandhi, seorang warga manusia yang dalam hidupnya berjuang terus tiada henti mengakhiri kekejaman. bahkan ia pernah berpuasa dan bertapa selama 13 hari lamanya, dari 17-30 September 1924, dengan hanya satu dambaan agar umat Hindu dan umat Islam dapat hidup rukun dan damai. Namun ia sendiri akhirnya meninggal

dalam perjuangannya mengakhiri konflik dan permusuhan itu, ia dibunuh oleh kelompok militan Hindu karena diduga dekat dengan Islam. Ia terbunuh di tengah perjalanan malamnya melakukan pertapaan pada 30 Januari 1948.<sup>3</sup>

Kembali pada perjuangan Gandhi yang lahir sejak lebih 100 tahun lalu, pada 2 Oktober 1869, semangatnya, penulis kira kini tetap hidup di ruangan ini karena kita akan membahas bagaimana kita dapat mengakhiri semua bentuk pertikaian dan tindak kekerasan yang ada di berbagai lini kehidupan kita. Meskipun, konvensi Anti Penyiksaan yang baru dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku pada 26 Juni 1987, namun tekad masyarakat internasional untuk menentang segala bentuk kekerasan sesungguhnya mulai terwujud dua tahun setelah peristiwa Chili pada tahun 1973. Pada 9 Desember 1975, Majelis Umum PBB menetapkan deklarasi tentang perlindungan terhadap penganiayaan, dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan sebagaimana yang

2. Gandhi told his children that every day before you go to bed, I would like you to write under these headings all the incidents of physical and passive violence that you experienced during the day and the relationship of these two types of violence with each other. I had to be honest and write about my own acts of violence during the day. This meant that every night I had to analyze my actions, and if I found them to be violent, then the act had to be put down in its appropriate place. It was an excellent way of introspection and acknowledgement of one's own violence (Soka Gakkai News, July 1999).

3. Homepage MK Gandhi Institute 1998.

terkandung dalam resolusi 3452.

Peristiwa Chili dipandang sebagai titik awal yang menggetarkan kesadaran manusia mengakhiri segala bentuk kekerasan yang akhirnya terwujud dalam suatu konvensi setelah 10 tahun kemudian. Ketika Presiden Chili, Salvador Allende, bertekad membawa negerinya menuju negara sosialis baru yang lebih demokratis, ia ternyata menghadapi tantangan yang amat berat. Lebih-lebih setelah ia menyatakan bahwa ia tidak akan mundur sebagai Presiden demi demokrasi. Akibatnya, sejak dini hari pada 11 September 1973, Istana Kepresidenan La Moneda dikepung oleh ribuan tentara dari semua angkatan termasuk kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet Ugarte dari Angkatan Darat. Melalui dukungan partai-partai sayap kanan, junta militer mendesak agar Allende mengundurkan diri secepatnya dengan batas waktu sebelum tengah hari.

Namun desakan itu ditolak. Allende memilih melawan. Militer kemudian menyerbu dan memporakporandakan istana. Allende tewas dengan tubuh ditembus puluhan peluru dalam kudeta itu. Militer kemudian mengambil-alih kekuasaan, partai-partai berhaluan Marxis dilarang, dan organisasi-organisasi buruh dibubarkan. Dalam opera-

si pembersihan itu yang berlangsung hingga November 1973, tidak kurang dari 30.000 pendukung Allende dibunuh sementara puluhan ribu lainnya disiksa dengan kejam. Kudeta militer itu, yang dianggap paling berdarah sepanjang abad ke-20, merupakan puncak dari keki-sruhan sosial politik yang panjang di negeri berpenduduk sepuluh juta jiwa itu.

Banjir darah di negeri yang dijuluki "Inggris di Selatan Amerika" itu mengguncang dunia. Peristiwa yang mengakhiri hidup Allende itu menjadi sejarah yang menjijikkan, yang membulatkan tekad masyarakat dunia untuk menggalang larangan internasional bagi segala bentuk kekejaman terhadap umat manusia. Di sinilah awal gelora keinginan yang kuat oleh sebagian besar negara Eropah Barat dan Timur, Asia, dan Afrika, untuk menutup lembaran sejarah hitam yang dilakukan oleh mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pemusnahan bangsa Yahudi, pembunuhan massal di Rwanda dan Kamboja, perang Vietnam dan juga pembantaian kaum (atau yang dicap) komunis di Indonesia. Rentetan peristiwa mengerikan itu telah mendorong kesadaran politik secara kolektif bangsa-bangsa di dunia terma-

suk Indonesia untuk menunjukkan dan melindungi HAM bagi semua warga negara dan meratifikasi konvensi Anti Penyiksaan ini.

Indonesia telah menandatangani Anti Penyiksaan pada 23 Oktober 1985 atau kurang dari setahun setelah konvensi itu ditetapkan, 10 Desember 1984. Untuk kawasan ASEAN, Indonesia negara pertama yang menandatangani Konvensi itu. Di tingkat Asia, Indonesia yang tergolong yang tercepat. Republik Rakyat Cina menandatangani Konvensi itu pada 12 Desember 1986, India pada 14 Oktober 1977, dan Jepang pada 29 Juli 1999. Di tingkat dunia, walau lebih lambat dibanding negara-negara Eropa Barat, Indonesia masih lebih unggul dari Australila, bahkan Amerika Serikat.

Karenanya lokakarya lima hari yang kita laksanakan mulai hari ini tentu mempunyai makna yang amat penting bagi proses sosialisasi konvensi itu sendiri dengan ke-33 pasalnya. Kegiatan ini sesungguhnya amat relevan dari komitmen Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Ibu Presiden Megawati yang menekankan perlunya meneruskan

proses reformasi dan demokratisasi dan terus meningkatkan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu dari enam Program Pokok kabinetnya.

Akhirnya, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang amat khusus kepada Mr Bill Barker kolega penulis dari *Human Rights International*, Australia, juga kepada Bapak Kakanwil dan Kormin Depkeh dan HAM Propinsi Sulawesi Selatan, propinsi tempat penulis dilahirkan dan dibesarkan, Ibu Salfrida Ramadhan KH, Direktur Pemantuan dan Evaluasi HAM, dan Panitia Penyelenggara Ibu Maria Tangke, S.H., dan unsur yang terlibat atas prakarsa dan kerjasamanya yang begitu baik sehingga lokakarya ini dapat diselenggarakan sebagaimana wujudnya saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanat yang amat mulia dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM untuk menjemput hari depan yang lebih baik, hari depan kita bersama. Dengan mengucapkan bismillahir-rahmanir-rahim, lokakarya ini penulis nyatakan dibuka.

